

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Sinyal

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal atau *signalling theory*. Pada tahun 1973, Michael Spence pertama kali mencetuskan teori sinyal. Spence (1973) dalam artikel jurnal yang berjudul *Job Market Signaling* menjelaskan bahwa “ketika perusahaan tidak tahu langsung produktivitas si pelamar, perusahaan akan menilai pelamar berdasarkan sinyal yang bisa diamati (seperti pendidikan, pengalaman, dll). Dari satu sudut pandang, maka sinyal dan indeks dapat dianggap sebagai parameter yang menggeser distribusi probabilitas bersyarat yang mendefinisikan keyakinan (ekspektasi) pemberi kerja”.

Ghozali (2021) menyatakan “teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (signaler) untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Teori sinyal menjelaskan bahwa manajemen memberikan sinyal tentang perusahaan lewat berbagai aspek pengungkapan informasi keuangan yang dapat dilihat sebagai sinyal oleh investor. Sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas

perusahaan. Sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan”.

Novianti, et al., (2022) menyatakan “Penggunaan teori sinyal, merupakan suatu informasi yang menerangkan mengenai *ROA* atau tingkat pengembalian terhadap aset atau mengenai seberapa besar laba yang dihasilkan dari aset yang digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang memiliki tingkat *ROA* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki kinerja keuangan yang baik maka investor akan tertarik menginvestasikan dananya. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik, yang mengakibatkan investor akan menangkap sinyal tersebut dengan positif”.

2.1.2 Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan menuliskan “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomis”. “Komponen laporan keuangan terdiri dari:”

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”. “Laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu” (Weygandt et al., 2022).

2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
“Menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan untuk periode tertentu” (Weygandt et al., 2022).
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”
“Meringkas perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu” (Weygandt et al., 2022).
4. “Laporan arus kas selama periode”
“Meringkas informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran) untuk periode waktu tertentu” (Weygandt et al., 2022).
5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”.
6. “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan”.
7. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan”.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Bab II (2022) tertulis bahwa:

- 1) “Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat”.

- 2) “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan”.
- 3) “Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. “Laporan keuangan tahunan”
 - b. “Laporan keuangan tengah tahunan”
- 4) “Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terdiri atas”
 - a. “Laporan posisi keuangan”
 - b. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain”
 - c. “Laporan perubahan ekuitas”
 - d. “Laporan arus kas, dan”
 - e. “Catatan atas laporan keuangan”

Dalam pasal 4 tertulis “laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”.

2.1.3 Profitabilitas

Weygandt et al. (2022) mendefinisikan, “profitabilitas adalah rasio yang mengukur keberhasilan atau operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu”. Subramanyam (2012) dalam Pasrin & Mursal (2021) menjelaskan “laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan”. Nurhaliza & Harmain (2022) menjelaskan “sebuah usaha atau bisnis digambarkan baik jika rasio profitabilitasnya semakin meningkat”.

Wardhani et al. (2023), “jika perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya, dapat dikatakan perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi”. Weygandt et al. (2022) menjelaskan “terdapat beberapa pengukuran rasio profitabilitas:”

1. “*Profit Margin*”

“Profit margin adalah ukuran persentase setiap penjualan yang menghasilkan laba bersih. Profit margin dapat dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih”.

2. “*Asset Turnover*”

“Asset turnover mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hal ini dapat dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Angka yang dihasilkan menunjukkan angka setiap penjualan yang diinvestasikan dalam aset, kecuali jika faktor musiman signifikan. Kita dapat menggunakan saldo awal dan akhir total aset untuk menentukan rata-rata total aset”.

2. “*Return on Assets*”

“Return on assets adalah ukuran profitabilitas dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset”.

3. “*Return on Ordinary Shareholders’ Equity*”

“*Return on ordinary shareholders’ equity* mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan oleh pemilik. *Return on ordinary shareholders’ equity* bisa dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Ketika sebuah perusahaan mempunyai saham preferen, kita

harus mengurangi persyaratan dividen preferensi dari laba bersih untuk menghitung pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa”.

4. “*Earning per Share (EPS)*”

“*Earning per share* adalah ukuran laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa. *Earning per share* dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Ukuran *earning per share* memberikan perspektif yang berguna untuk menentukan profitabilitas. Istilah “*earning per share*” mengacu pada jumlah laba bersih yang berlaku untuk setiap saham biasa. Oleh karena itu, dalam menghitung EPS, jika ada dividen preferensi yang diumumkan pada periode tersebut, kita harus mengurangkannya dari laba bersih. untuk menentukan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa”.

5. “*Price Earning Ratio*”

“*Price earning ratio* adalah ukuran yang banyak digunakan untuk mengukur rasio harga pasar setiap saham biasa terhadap laba per saham. *Price earning ratio* mencerminkan penilaian investor terhadap pendapatan perusahaan di masa depan. *Price earning ratio* dapat dihitung dengan membagi harga pasar per saham dengan laba per saham”.

6. “*Payout Ratio*”

“*Payout ratio* mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. *Payout ratio* dihitung dengan membagi dividen tunai yang dibayarkan atas saham biasa dengan laba bersih. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi umumnya

memiliki *payout ratio* yang rendah karena mereka menginvestasikan kembali sebagian besar laba bersihnya ke dalam bisnis”.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Assets (ROA)*. “*ROA* merupakan rasio yang mengukur laba yang mampu dihasilkan perusahaan melalui penggunaan aset yang ada” (Weygandt et al., 2022). Sedangkan, menurut Wahyuni dan Hafiz (2021), *ROA* merupakan alat ukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya dan merupakan suatu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang ada dan setelah biaya-biaya modal dikeluarkan dari analisis. Menurut Daulay et al. (2022), “semakin besar nilai *ROA*, maka semakin besar pula kinerja perusahaan, karena *return* yang diperoleh perusahaan semakin besar”. “Meningkatkan *ROA* berarti di sisi lain juga meningkatkan pendapatan bersih perusahaan, yang berarti nilai penjualan juga akan meningkat. Perusahaan yang nilai penjualannya meningkat, akan mendorong terjadinya peningkatan laba yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Kondisi seperti ini akan mudah untuk menarik investor, karena para investor lebih suka berinvestasi pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi” (Ardiyanto et al., 2020). “Perusahaan yang memiliki *ROA* yang tinggi dapat menjadikan daya tarik bagi investor” (Kartiko & Rachmi, 2021).

“Penurunan dari nilai *ROA* disebabkan adanya peningkatan aset hak guna dan penurunan nilai laba bersih perusahaan dari timbulnya beban depresiasi dan beban bunga liabilitas sewa” (Mashuri, 2021). “Jumlah aset perusahaan yang sangat besar tetapi disertai dengan laba yang rendah menunjukkan bahwa manajemen aset tidak memadai sehingga menyebabkan penurunan *ROA*. Kenaikan laba bersih yang tidak sebanding dengan peningkatan total aset perusahaan dan adanya kenaikan biaya operasional menjadi penyebab nilai *ROA* turun” (Andani et al., 2023). “Jika

perusahaan memiliki *ROA* yang rendah dapat mengurangi minat investor terhadap perusahaan tersebut” (Kartiko & Rachmi, 2021).

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut (Weygandt et al., 2022):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets} \quad (2.1)$$

Keterangan:

ROA : *Return on Assets*

Net Income : Laba bersih periode berjalan

Average Total Assets : Rata-rata total aset

Menurut Weygandt et al. (2022), rata-rata total aset dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Average\ Total\ Assets = \frac{Assets_t + Assets_{t-1}}{2} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Average Total Assets : Rata-rata total aset

Asset_t : Total aset perusahaan pada periode berjalan

Asset_{t-1} : Total aset perusahaan pada periode sebelumnya

Menurut Datar & Rajan (2021), “pendapatan bersih (*net income*) adalah pendapatan operasional ditambah pendapatan non-operasional (seperti pendapatan bunga) dikurangi biaya non-operasional (seperti biaya bunga) dikurangi pajak penghasilan”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2025) dalam PSAK 201 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, “laba tahun berjalan didapatkan dengan cara mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan pada tahun berjalan sehingga menghasilkan laba bruto. Selanjutnya laba bruto ditambah dengan

penghasilan lain dan bagian laba entitas asosiasi dan dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, dan biaya pendanaan yang menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian, laba tahun berjalan dari operasi yang dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sehingga akan menghasilkan laba tahun berjalan”.

“Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasional suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut” (Kieso et al., 2024):

1. *“Sales”*
“Perhitungan pendapatan bersih atas penjualan yang terdiri dari penjualan, diskon atas penjualan, retur penjualan” (Kieso et al., 2024).
2. *“Cost of Goods Sold”*
“Harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berjalan” (Kieso et al., 2024).
3. *“Gross Profit”*
“Hasil dari pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan” (Kieso et al., 2024).
4. *“Selling Expenses”*
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan penjualan” (Kieso et al., 2024).
5. *“Administrative or General Expenses”*
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan administrasi perusahaan” (Kieso et al., 2024).
6. *“Other income and expense”*

“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. Item tersebut dapat berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan penurunan nilai aset. Pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen dan pendapatan bunga juga dilaporkan dalam bagian *other income and expense*” (Kieso *et al.*, 2024).

7. “*Income from Operations*”

“Hasil dari pengurangan antara *gross profit* dengan *selling expense* dan *administrative* atau *general expense* serta ditambah atau dikurangi dengan *other income and expense* maka menjadi *income from operations*. *Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal” (Kieso *et al.*, 2024).

8. “*Financing Costs*”

“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan pembiayaan seperti beban bunga” (Kieso *et al.*, 2024).

9. “*Income Before Income Tax*”

“Merupakan total pendapatan sebelum pajak atau hasil dari pengurangan *income from operations* dengan *financing cost*” (Kieso *et al.*, 2024).

10. “*Income Tax*”

“Pajak yang dipungut atas penghasilan sebelum pajak penghasilan” (Kieso *et al.*, 2024).

11. “*Income from Continuing Operations*”

“Merupakan hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, jika tidak memilikinya maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlahnya akan dilaporkan sebagai laba bersih” (Kieso *et al.*, 2024).

12. “*Discontinued Operations*”

“Merupakan keuntungan atau kerugian dari operasional perusahaan yang dihentikan.” (Kieso *et al.*, 2024).

13. “*Net Income*”

“Merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu.” (Kieso *et al.*, 2024).

14. “*Non-Controlling Interest*”

“Menampilkan alokasi dari laba bersih perusahaan untuk pemegang saham pengendali serta untuk kepentingan non pengendali yang muncul jika terdapat konsolidasi perusahaan” (Kieso *et al.*, 2024).

15. “*Earning per Share*”

“Merupakan laba per lembar saham yang dilaporkan” (Kieso *et al.*, 2024).

Menurut Weygandt *et al.* (2022), “laporan posisi keuangan melaporkan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam aktivitas tertentu seperti produksi dan penjualan”. Menurut Kieso *et al.* (2024), “aset dibagi menjadi dua kategori, yakni *current asset* (aset lancar) dan *non-current asset* (aset tidak lancar). *Current asset* merupakan kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam siklus operasi, mana saja yang lebih lama. Lima item yang terdapat dalam aset lancar yaitu:

1. “*Inventories*”

“Untuk menyajikan persediaan dengan tepat, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian dan asumsi arus biaya yang digunakan.”

2. “*Prepaid Expenses*”

“Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat (biasanya layanan) dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama.”

3. “*Receivables*”

“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait.”

4. “*Short-term investments*”

“Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (baik utang atau ekuitas) sebagai aset lancar. Ini mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individu sebagai lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Ini harus melaporkan diadakan untuk-koleksi (kadang-kadang disebut sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo) dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perdagangan sekuritas dilaporkan sebesar nilai wajar.”

5. “*Cash and cash equivalents*”

“Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro (uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas bersifat jangka pendek, investasi yang sangat likuid yang akan jatuh tempo.”

Sedangkan *non-current asset* merupakan aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. *Non-current asset* terdiri atas:

1. “*Long-term investments* (investasi jangka panjang) yang dikelompokkan menjadi empat tipe, yakni investasi dalam surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang, investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi, investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti dana cadangan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik, dan investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi”.

2. “*Property, plant, and equipment* (aset tetap) merupakan aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi reguler bisnis. Aset-aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabot, peralatan, dan sumber daya yang terbuang (mineral). Kecuali tanah, perusahaan akan mendepresiasi aset-aset ini”.
3. “*Intangible assets* (aset tidak berwujud) merupakan aset tidak berwujud dan tidak termasuk ke dalam instrumen keuangan. Beberapa contoh aset tidak berwujud adalah *patents, copyrights, franchises, trademarks, trade names*, dan *customer lists*. Perusahaan melakukan amortisasi terhadap *limited-life intangible assets* sepanjang masa manfaatnya”.
4. “*Other assets* (aset lainnya) merupakan kategori aset tidak lancar yang bervariasi seperti *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*. Beberapa item yang termasuk ke dalam aset lainnya adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya. Perusahaan harus membatasi bagian ini untuk memasukkan hanya item-item yang tidak biasa yang cukup berbeda dari aset yang termasuk dalam kategori tertentu”.

Ada beberapa faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi *return on assets (ROA)* yaitu rasio likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris independen.

2.1.4 Likuiditas

“Apabila perusahaan mampu melunasi utang jangka pendek tepat waktu dan tidak ada risiko gagal bayar, bisa dikatakan kinerja keuangannya baik” (Gunawan, 2021). Menurut Weygandt et al. (2022), “likuiditas merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga”. Menurut Chasanah & Adhi

(2017) dalam Priyatama & Pratini (2021), “likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya”. Selanjutnya menurut (Septhasari & Surjadi, 2021), “likuiditas merupakan kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan utang jangka pendek. Penggunaan utang jangka pendek dapat berdampak baik bagi perusahaan jika perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan dapat memanfaatkannya dengan baik untuk pendanaan kegiatan dalam tujuan memperoleh laba. Perusahaan dapat mengajukan pinjaman untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi barang atau jasa. Jadi, likuiditas memiliki peluang jika mengalami kenaikan maka diikuti dengan kenaikan profitabilitas atau laba perusahaan. Namun, tidak hanya ditinjau dari sisi positifnya. Likuiditas dapat berdampak negatif bagi perusahaan jika perusahaan mendanai semua kegiatan operasionalnya dengan menggunakan pinjaman dengan bunga tinggi sehingga perusahaan harus menanggarkan dana untuk membayar kewajibannya sehingga tidak memiliki peluang yang berorientasi terhadap laba yang maksimal sehingga jika likuiditas semakin tinggi menyebabkan suatu perusahaan akan mengalami kerugian.”

“Terdapat empat cara untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu (Weygandt, et al, 2022):

1) “*Current Ratio*”

“Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Rasio ini dihitung dengan membagi *current assets* dengan *current liabilities*”.

2) “*Quick Ratio* “

“Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek secara langsung. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah *cash, short-term investment, dan net account receivable* dengan *current liabilities*”.

3) “*Account Receivable Turnover*”

“Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas piutang. Rasio ini dihitung dengan membagi *net credit sales* dengan *average net account receivable*”.

4) “*Inventory Turnover*”

“Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran berapa kali rata-rata persediaan dijual selama periode tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi *cost of goods sold* dengan *average inventory*”.

Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah *current ratio* yang diukur dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Menurut Sutrisno (2013) dalam Silalahi et al. (2022), “*current ratio* atau rasio lancar merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek”. Selanjutnya, Kasmir (2014) dalam Silalahi et al. (2022) juga menjelaskan bahwa “*current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan, dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo”.

Menurut Weygandt et al. (2022), CR dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

CR : *Current Ratio*

Current Assets : Jumlah aset lancar

Current Liabilities : Jumlah liabilitas jangka pendek

Menurut Kieso et al. (2024), “*Current asset* merupakan kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam siklus operasi, mana saja yang lebih lama.” Lima item yang terdapat dalam aset lancar yaitu:

1. “*Inventories*”

“Untuk menyajikan persediaan dengan tepat, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian dan asumsi arus biaya yang digunakan.”

2. “*Prepaid Expenses*”

“Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat (biasanya layanan) dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama.”

3. “*Receivables*”

“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait.”

4. “*Short-term investments*”

“Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (baik utang atau ekuitas) sebagai aset lancar. Ini mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individu sebagai lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Ini harus melaporkan diadakan

untuk-koleksi (kadang-kadang disebut sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo) dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perdagangan sekuritas dilaporkan sebesar nilai wajar.”

5. “*Cash and cash equivalents*”

“Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro (uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas bersifat jangka pendek, investasi yang sangat likuid yang akan jatuh tempo.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2025) dalam PSAK 201 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika”:

1. “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal”;
2. “Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”;
3. “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”; atau
4. “Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 207: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Weygandt et al. (2022), “*current liabilities* (liabilitas jangka pendek) merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam periode berjalan.” Beberapa akun yang masuk kedalam kategori *current liabilities* diantaranya yaitu:

1. “*Account Payable*”

“*Account Payable* merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang terjadi atas transaksi jual beli barang atau jasa secara kredit” (Weygandt et al., 2022).

2. “*Interest Payable*”

“*Interest Payable* merupakan utang yang disebabkan oleh adanya transaksi pinjaman yang dikenakan bunga yang belum dibayarkan” (Weygandt et al., 2022).

3. “*Income Tax payable*”

“*Income Tax payable* merupakan utang pajak penghasilan yang belum dibayarkan oleh perusahaan” (Weygandt et al., 2022).

4. “*Dividend Payable*”

“*Dividend Payable* merupakan jumlah dividen yang wajib dibayarkan perusahaan kepada para pemegang saham” (Weygandt et al., 2022).

5. “*Salary and Wages Payable*”

“*Salary and Wages Payable* merupakan utang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan perusahaan” (Weygandt et al., 2022).

6. “*Unearned Service Revenue*”

“*Unearned Service Revenue* adalah akun yang timbul atas adanya penerimaan pendapatan barang atau jasa yang belum dilaksanakan” (Weygandt, et al., 2022).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2025) dalam PSAK 201 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika”:

1. “Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal”;
2. “Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan”;

3. “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”; atau
4. “Entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

2.1.5 Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas

“*Current ratio* yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki aset lancar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban lancar. Hal ini menunjukkan perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya, sehingga dapat diartikan aset suatu perusahaan bersifat likuid” (Chandra & Osesoga, 2021). “Tingginya aset lancar menunjukkan ketersediaan dana jangka pendek yang dapat digunakan selain untuk melunasi utang jangka pendek, juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam meningkatkan penjualan guna menghasilkan laba” (Diana & Osesoga, 2020). Kemudian, diperjelas oleh Prameswari & Hermawan (2023) bahwa “kinerja keuangan yang positif dapat membantu meningkatkan pertumbuhan laba, karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar”. “Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dan dapat dipenuhi tepat waktu, mendorong semakin baik juga tingkat kepercayaan dari pihak eksternal, karena perusahaan tersebut dianggap mampu untuk melunasi kewajiban atau utang pada saat jatuh tempo pada kreditor. Namun demikian, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi lebih memilih menggunakan dana dari internalnya untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan melakukan pinjaman dari luar atau dari pihak eksternal. Likuidnya perusahaan menjadi salah satu indikasi ketersediaan dana internal yang memadai sehingga perusahaan tidak terlalu tergantung pada pendanaan berupa utang” (Gasuser, 2023). Milansari et al.

(2020), menjelaskan “perusahaan dengan tingkat CR tinggi menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai cukup banyak dana yang digunakan untuk operasi perusahaan”.

Menurut penelitian Rosyanti *et al.* (2022), Rafli & Ikhsan (2024), Yanti *et al.* (2025), Kristanti *et al.* (2024), Faika & Dewi (2023), Hutabarat (2022), likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusaka & Takarini (2023) likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Silviani & Arisman (2024) likuiditas yang diproksikan dengan CR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.1.6 Pertumbuhan Penjualan

“Penjualan perusahaan didapatkan di dalam laporan laba rugi perusahaan selama periode. Laporan laba rugi selama periode diawal dengan penjualan, kemudian dikurangi dengan *sales return and allowances* yang merupakan transaksi ketika pembeli mengembalikan barang kepada penjual atau mengurangi harga beli dan pembeli masih memegang barang tersebut. Setelah penjualan dikurangi *sales return and allowances* kemudian dikurangi *sales discount* yang merupakan potongan harga untuk pembeli yang melakukan pembelian secara tunai. Penjualan dikurangi *sales return and allowances* dan *sales discount* akan didapatkan penjualan bersih” (Weygandt *et al.*, 2019). “Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan

jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu” (Kennedy, et al, 2013 dalam Vidyasari, et al, 2021).

“Pendapatan merupakan kenaikan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Umumnya pendapatan dihasilkan perusahaan dari penjualan barang dagangan, penjualan jasa, penyewaan properti, dan meminjamkan uang” (Weygandt et al., 2019). Menurut IAI (2022) dalam PSAK 72, “untuk mengakui pendapatan, entitas harus melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 tahapan seperti:” (Kieso et al., 2020):

1. “Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan”

“Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan. Kontrak yang valid antara pelanggan dan penjual dipenuhi dengan komponen berikut:”

- a. “Kontrak tersebut memiliki substansi komersial”
- b. “Setiap pihak menyetujui kontrak”
- c. “Identifikasi hak setiap pihak ditetapkan”
- d. “Ketentuan pembayaran”
- e. “Kemungkinan besar menerima imbalan”

2. “Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan

“Kewajiban pelaksanaan yaitu kewajiban menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan”

3. “Menentukan harga transaksi”

“Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan atas produk atau layanan yang diberikan.”

4. “Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan”

“Perusahaan sering harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam sebuah kontrak. Jika alokasi diperlukan, harga transaksi didasarkan pada nilai wajar relatifnya (*relative fair value*).”

5. “Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.”

“Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang dan layanan. Pelanggan mengontrol produk atau layanan jika pelanggan memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari produk atau layanan.”

“Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu” (Kennedy, et al., 2013 dalam Vidyasari, et al., 2021). Selain itu menurut Vidyasari et al. (2021) “penjualan memiliki pengaruh yang strategi bagi sebuah perusahaan, karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aset dan bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah dengan mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada”.

Yoyon dan Hafsah (2018), “Pertumbuhan penjualan juga merupakan suatu indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri”. Kasmir (2012) dalam Aan, et al. (2023), “*Sales growth* menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”. Aan (2023), “*Sales Growth* mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya”.

Dewi dan Santoso (2020), “Laju pertumbuhan penjualan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Semakin banyak transaksi yang dilakukan perusahaan tentu akan meningkatkan volume penjualan, dengan penjualan yang meningkat akan memberikan keuntungan atau profit”. Yoyon dan Hafsa (202), “Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang”. Sukadana dan Triaryati (2022), “Pertumbuhan penjualan perusahaan tetap stabil atau bahkan meningkat, dan biaya- biaya dapat dikendalikan, maka profit yang diperoleh akan meningkat. Jika profit meningkat, maka profit yang akan diperoleh investor juga dapat meningkat”.

“*Sales growth* atau pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara mengurangi penjualan di periode ini dengan penjualan di periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan penjualan periode sebelumnya., seperti yang ditunjukkan pada rumus di bawah ini” (Harahap, 2016 dalam Murthi *et al.*, 2021):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Sales_t : Total penjualan periode ini

Sales_{t-1} : Total penjualan periode sebelumnya

“Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan antara lain:” (Kotler *et al.*, 2021)

1. “Strategi Pemasaran”

“Pentingnya pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Pemasaran yang sukses adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan

penjualan. Bagian ini menjelaskan bagaimana kampanye pemasaran yang menarik dan inovatif dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru.” (Kotler *et al.*, 2021)

2. “Pengembangan Produk”

“Inovasi produk dan pengembangan layanan baru juga dapat merangsang pertumbuhan penjualan. Meluncurkan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada.” (Kotler *et al.*, 2021)

3. “Ekspansi Pasar”

“Memasuki pasar baru atau memperluas jangkauan geografis juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan penjualan. Ini termasuk meluncurkan produk di negara atau wilayah baru yang sebelumnya tidak terjangkau..” (Kotler *et al.*, 2021)

4. “Volume Penjualan dan Harga Jual”

“Volume penjualan adalah jumlah unit yang terjual dalam periode tertentu. Peningkatan volume penjualan sering kali menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti promosi, diskon, atau peningkatan kualitas produk yang menarik lebih banyak pelanggan.”

5. “Harga Jual”

“Pertumbuhan penjualan juga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga jual. Jika perusahaan mampu menaikkan harga tanpa mengurangi volume penjualan, ini dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan.” (Kotler *et al.*, 2021)

“Berikut merupakan jenis-jenis *sales*:” (Weygandt *et al.*, 2021)

1. “Penjualan Tunai (*Cash Sales*)”

“Penjualan tunai adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan secara langsung dan penuh saat produk atau layanan diserahkan kepada pelanggan. Penjualan tunai dicatat sebagai pendapatan yang diterima.” (Weygandt et al., 2021)

2. “Penjualan Kredit (*Credit Sales*)”

“Penjualan kredit adalah transaksi di mana produk atau layanan diserahkan kepada pelanggan, namun pembayaran dilakukan di kemudian hari. Dalam akuntansi, ini dicatat sebagai piutang usaha.” (Weygandt et al., 2021)

3. “Penjualan Diskon (*Sales Discount*)”

Penjualan diskon adalah pengurangan harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai insentif untuk membayar lebih awal. Diskon ini dapat berupa diskon tunai (*cash discount*) atau diskon volume (*volume discount*).” (Weygandt et al., 2021)

4. “Penjualan Retur (*Sales Returns*)”

“Penjualan retur adalah situasi di mana pelanggan mengembalikan barang yang telah dibeli. Dalam akuntansi, penjualan retur akan mengurangi total penjualan yang telah diakui.” (Weygandt et al., 2021)

5. “Penjualan *Gross* dan *Net*”

“Penjualan *Gross*: Total penjualan yang tercatat sebelum dikurangi diskon, retur, dan pengembalian. Penjualan *Net*: Total penjualan setelah dikurangi diskon, retur, dan pengembalian.” (Weygandt et al., 2021)

6. “Penjualan Jasa (*Service Sales*)”

“Penjualan jasa adalah transaksi di mana perusahaan menjual layanan daripada produk fisik. Ini dapat mencakup berbagai sektor, seperti

konsultasi, perawatan kesehatan, atau pendidikan.” (Weygandt et al., 2021)

7. “Penjualan Langsung (*Direct Sales*)”

“Penjualan langsung adalah metode penjualan di mana tenaga penjual berinteraksi langsung dengan pelanggan tanpa perantara.” (Weygandt et al., 2021)

Pengakuan pendapatan memegang peranan penting dalam mengukur pertumbuhan penjualan karena cara dan waktu pengakuan pendapatan dapat mempengaruhi angka pertumbuhan yang dilaporkan. Menurut PSAK No. 23 dalam Sagita 2023, “Pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagih, sedangkan pengakuan beban diakui pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, misalnya pada saat timbul kewajiban karena adanya jaminan barang.” Pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK adalah:

1. Paragraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa “Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:”
 - a. “Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;”
 - b. “Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;”
 - c. “Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal;”
 - d. “Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan”
 - e. “Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal”.

2. Paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa “Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:”
 - a. “Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;”
 - b. “Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;”
 - c. “Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal; dan”
 - d. “Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal”.
 - e. “Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan.”
3. Paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa “Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui jika:”
 - a. “Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dg transaksi tsb akan mengalir ke entitas;”
 - b. “Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.”
4. Dalam paragraf 30 dinyatakan bahwa “Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut:
 - a. “Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan di PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 09 dan PA 05-08;”

- b. “Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan”
- c. “Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan”.”

2.1.7 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas

Menurut Yuliani (2021), “Pertumbuhan penjualan adalah perubahan dalam nilai atau volume penjualan yang terjadi dalam jangka waktu yang berbeda. Ini biasanya ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis menghasilkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa adalah pertumbuhan penjualan. Untuk mengetahui apakah aktivitas penjualan meningkat atau menurun, Anda dapat membandingkan data penjualan dari tahun ke tahun. Hal ini juga menunjukkan hasil positif dari investasi sebelumnya dan menunjukkan peningkatan penjualan di masa depan.” Rafli & Ikhsan (2024) menjelaskan, “Pertumbuhan penjualan yang tinggi menjadikan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui penjualan produknya. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan penjualan memegang peranan penting dalam mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang stabil dapat memberikan sinyal penting kepada perusahaan mengenai hasil profitabilitas.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyanti *et al.* (2022), Rafli & Ikhsan (2024), Kristanti *et al.* (2024), Rantik *et al.* (2022), Silviandri & Anton yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Ummah & Efendi (2022), pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

yang diproksikan dengan *ROA*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif penelitian sebagai berikut:

Ha₂: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.1.8 Dewan Komisaris Independen

Menurut Hantono et al. (2023), komisaris independen bagian dari anggota dewan komisaris yang dijelaskan sebagai berikut: “Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi hubungan yang bersangkutan untuk bertindak independen.” Sudarmanto et al. (2021) mendefinisikan komisaris independen sebagai berikut: “Komisaris independen, yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”. Menurut Setiawan (2018) dalam Permana & Serly (2021) menjelaskan komisaris independen sebagai berikut: “komisaris independen adalah semua anggota dewan komisaris yang bekerja secara independen atau tidak berpihak kepada siapapun, tidak mudah dipengaruhi dan berlaku secara adil terhadap masalah yang dihadapi perusahaan serta komisaris independen berperan penting terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Komisaris independen harus mengawasi secara efektif untuk meminimalkan kesalahan oleh manajemen.”

Kusmayadi et al. (2015) dalam Karunia & Rusyfan (2021) menjelaskan “pengertian komisaris independen yang biasa dipakai dalam kode akuntan publik ada dua:”

1. *“Independent in fact”*

“Menekankan pada sikap mental seseorang dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar.”

2. *“Independent in appearance”*

“Dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan seseorang yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan darah dengan perusahaan dan/atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan.”

Dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang perseoran terbatas pasal 120 berbunyi “komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.”

Dalam POJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam pasal 22 menjelaskan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. “bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam)

bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen;”

- b. “tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;”
- c. “tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direks dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan”
- d. “tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek”.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sama dengan dewan komisaris. Dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 28 menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris sebagai berikut:

1. “Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.”
2. “Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.”
3. “Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.”
4. “Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.”

5. “Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku”.

Amri (2011) dalam Karunia & Rusyfan (2021) menjelaskan “tanggung jawab pokok komisaris independen adalah untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan, melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasannya dan memberikan nasihat kepada direksi secara efektif serta lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.” Tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh komisaris independen antara lain: (Karunia & Rusyfan, 2021)

- a. “Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut.”
- b. “Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.”
- c. “Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.”
- d. “Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.”
- e. “Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.”
- f. “Memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik.”

Amri (2011) dalam Karunia & Rusyfan (2021) menjelaskan tugas komisaris independen sebagai berikut:

- a. “Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan.”
- b. “Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.”
- c. “Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.”
- d. “Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.”
- e. “Menjamin akuntabilitas organ perseoran (misalnya rapat umum pemegang saham.”

Alexandra et al. (2022) menjelaskan “komisaris independen berfungsi di dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi dalam hal mengontrol masalah keuangan perusahaan agar dewan direksi tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan dan terhindar dari kondisi kesulitan keuangan”.

Dalam POJK No. 57/POJK.04/2017 pasal 23 ayat 1, “dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dalam pasal 21, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui komisaris independen.” Fungsi audit yang dimaksud diatur dalam pasal 21 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2017, yaitu melakukan penelaahan atas:

- a. “informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;”
- b. “independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;”
- c. “rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan”
- d. “pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.”

Dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat (3) menjelaskan bahwa “jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.” Dalam penelitian ini, komisaris independen diprosikan dengan proporsi jumlah komisaris independen. Menurut Nasriani (2024), dewan komisaris independen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Menurut Hantono et al. (2023), dewan komisaris dapat didefinisikan sebagai berikut: “dewan komisaris merupakan komponen strategis dalam tata kelola perusahaan yang baik, yang berkontribusi dalam mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan secara sehat, beretika dan bertanggung jawab. Perusahaan yang sehat dan dikelola secara bertanggungjawab memiliki peluang besar untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.”

POJK No. 57/POJK.04/2017 pasal 1 menjelaskan “Dewan Komisaris adalah organ perusahaan efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”

Pasal 18 ayat (1) dalam POJK No. 57/POJK.04/2017 menjelaskan penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:

- a. “ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;”

- b. “kondisi Perusahaan Efek;”
- c. “keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan”
- d. “efektivitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.”

Dalam POJK No. 57/POJK.04/2017 pasal 18 ayat (2) menjelaskan “jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota direksi.” Dalam pasal 20 ayat (1) POJK No. 57/POJK.04/2017, “setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.” Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam POJK No. 57/POJK.04/2017 pasal 21, sebagai berikut:

1. “Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.”
2. “Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.”
3. “Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).”
4. “Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen.”

2.1.9 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas

Menurut Aisyah & Afriyenti (2022) menjelaskan bahwa, “keberadaan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan berfungsi sebagai pihak yang netral dan objektif dalam mengawasi kebijakan serta keputusan strategis manajemen,

sehingga dapat mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.” Menurut Handayani et al. (2024) “Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen mampu mempengaruhi perilaku Dewan Direksi dengan cara memberi masukan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin banyak jumlah Komisaris Independen, fungsi pengawasan perusahaan akan terlaksana dengan baik sehingga *Return on Asset (ROA)* perusahaan juga meningkat. Selain itu, Setyawan & Aryati (2023) menyatakan bahwa, “Proporsi komisaris independen yang memadai dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Pengawasan yang kuat dari komisaris independen mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan berorientasi pada kinerja keuangan jangka panjang. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan meningkatkan efektivitas penggunaan aset dan menekan biaya yang tidak perlu, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan.”

Menurut Afsari et al. (2025) “Keberadaan Komisaris Independen memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan yang objektif, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola perusahaan. Dengan pengawasan yang efektif, manajemen terdorong untuk bertindak efisien dan selaras dengan kepentingan perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan profitabilitas.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasriani (2024), Handayani et al. (2024), Afsari et al. (2025) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *ROA*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktafiana & Suryono (2022) dan Rimardhani et al (2021), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Namun menurut penelitian yang dilakukan Putri et al. (2023), menunjukkan bahwa

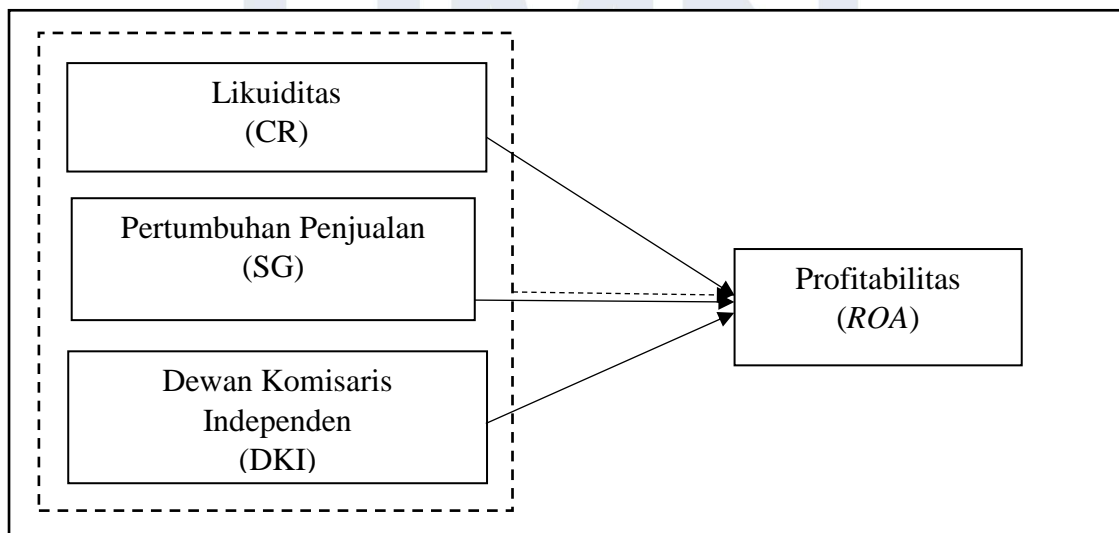
dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif penelitian sebagai berikut:

Ha₃: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.1.10 Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas secara simultan

Penelitian yang dilakukan oleh Karimah & Mahroji (2023) struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aisyah *et al.*, (2024) likuiditas, *leverage*, dan *sales growth* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *ROA*. Berdasarkan penelitian Rohman & Imron (2023) kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, *leverage* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA*.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Model Penelitian